

**ANALISIS POTENSI POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KECAMATAN KOTA MASOHI
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**

Syarif Indrawan Patara

NPP. 32.1010

Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Program studi Politik Indoneisa Terapan

Email: 31.1010@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The practice of money politics has become a worrying phenomenon in the democratic process in Indonesia, including in Kota Masohi District which recorded 29.6% of money politics cases from the total cases in Central Maluku Regency in the 2020 Pilkada. However, there has been no research that examines strategies to minimize the practice of money politics and focuses on causal factors other than socio-economic factors. **Purpose:** This study aims to analyze the causes of money politics practices, the possibility of minimizing them, and formulating effective prevention strategies. **Method:** Using a qualitative descriptive-analytical approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants numbered 39 people consisting of election supervisors, election organizers, community leaders, the general public, and political parties. **Result:** The study identified that the practice of Money Politics in Kota Masohi District occurred due to weak supervision and policy regulation from KPU regulations, the existence of transactional winning strategies and the strong political patronage system "Pela-Gandong" which resulted in the people of Kota Masohi District practicing money politics. **Conclusion:** The practice of money politics in Kota Masohi District occurred due to political, legal and cultural factors that require a complex policy strategy to minimize the occurrence of money politics cases in regional or general elections. As well as being a guideline in strengthening supervision and strengthening a clean, honest and fair democratic system.

Keywords: Money Politics, Regional Head Election, Masohi City District, Prevention Strategy, Political Patronage.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Praktik politik uang telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kota Masohi yang mencatat 29,6% kasus politik uang dari total kasus di Kabupaten Maluku Tengah pada Pilkada 2020, Namun belum terdapat penelitian yang mengkaji tentang strategi dalam meminimalisir praktik politik uang dan berfokus pada faktor penyebab selain sosio-ekonomi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya praktik politik uang, kemungkinan

meminimalisirnya, dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 39 orang yang terdiri dari unsur pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan partai politik. **Hasil/Temuan:** Penelitian mengidentifikasi bahwa praktik Politik Uang di Kecamatan Kota Masohi terjadi karena lemahnya pengawasan dan regulasi kebijakan dari peraturan KPU, adanya strategi pemenangan yang bersifat transaksional dan kuatnya system patronase politik “Pela-Gandong” yang mengakibatkan masyarakat kecamatan kota masohi melakukan praktik politik uang. **Kesimpulan:** Praktik Politik uang di Kecamatan Kota Masohi terjadinya karena faktor politik, hukum dan budaya yang memerlukan sebuah strategi kebijakan yang kompleks untuk meminimalisir terjadinya kasus politik uang di pemilihan kepala daerah atau umum. Serta menjadi pedoman dalam menguatkan pengawasan dan menguatkan system demokrasi yang bersih, jujur dan adil

Kata kunci: Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah, Kecamatan Kota Masohi, Strategi Pencegahan, Patronase Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi dalam konteks pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan sistem pemilihan umum atau kebebasan berekspresi, tetapi juga tercermin dalam transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai *democratic governance system*, di mana tindakan administrasi publik—terutama dalam pemberian layanan publik—harus mengakomodasi nilai-nilai demokratis sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik (Silalahi & Syafri, 2015, hlm. 5).

Pemerintahan Negara demokratis adalah pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat yang memerintah dalam pemerintahan demokratis. Hal ini tidak bermakna bahwa rakyat secara langsung memimpin pemerintahan, akan tetapi kedaulatan rakyat dilakukan dengan cara rakyat memilih wakilnya untuk memimpin pemerintahan antara lain pemimpin pemerintahan (Presiden dan Kepala Daerah) dan anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat dalam mengurus pemerintahan" (Rowa, 2015, p. 129). Pemilihan umum merupakan instrumen vital dalam sistem demokrasi modern sebagai mekanisme distribusi dan pembatasan kekuasaan (Sule, Adamu, & Sambo, 2020). Namun, praktik politik uang menjadi tantangan serius yang mengancam integritas proses pemilu di berbagai negara. Di Pakistan, dalam 48 tahun sejarah elektoral, pemilihan selalu diwarnai tuduhan kecurangan dan manipulasi yang menciptakan ketidakpastian politik (Begum, 2022). Demikian pula di Nigeria, pemilihan umum seringkali diselubungi kekerasan, manipulasi, dan korupsi (Sule, Adamu, & Sambo, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan strategi pencegahan efektif. (Daud, Aminullah, dan Jaya 2020) mengidentifikasi tiga pendekatan: tindakan pre-eventif untuk menangani pelanggaran dari tahap persiapan hingga implementasi, tindakan preventif berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, dan upaya represif yang berfokus pada penindakan pasca kejahatan. Di Indonesia, politik uang termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk "serangan fajar" dan mobilisasi massa melalui insentif finansial (Daud, Aminullah, & Jaya, 2020). Permasalahan politik uang memiliki dimensi kompleks yang bervariasi antar negara. Di Pakistan, upaya reformasi elektoral telah dilakukan sejak 2008, namun implementasinya terhambat

kurangnya konsensus antar partai politik (Begum, 2022). Sementara di Nigeria, politik uang menjadi strategi elit politik yang diperparah oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan (Sule, Adamu, & Sambo, 2020). Penelitian ini berupaya menganalisis penyebab terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, kemungkinan meminimalisirnya, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Pendekatan untuk mengatasi politik uang harus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik sosio-kultural masyarakat setempat, mengingat manifestasi politik uang seringkali berakar pada dinamika sosial-politik yang spesifik di setiap daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan Lokasi dan Konteks Budaya

Studi terdahulu seperti penelitian Nurjulaiha et al. (2022) dan Lampus et al. (2022) lebih berfokus pada praktik politik uang di wilayah Indonesia Barat seperti Provinsi Jambi dan Sulawesi Utara. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena politik uang di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki karakteristik sosio-kultural yang unik dengan sistem pela-gandong sebagai bentuk patronase tradisional. Padahal, data menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Masohi mencatat 29,6% kasus politik uang dari total kasus di Kabupaten Maluku Tengah pada Pilkada 2020.

Kesenjangan Teoretis

Mayoritas penelitian sebelumnya seperti Romadhon et al. (2023) dan Zahra et al. (2024) menganalisis politik uang terbatas pada aspek hukum dan peran lembaga pengawas, tanpa mengintegrasikan berbagai faktor penyebab secara komprehensif. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengaplikasikan teori politik uang Mada Sukamajati (2021) yang mengintegrasikan faktor politik, hukum, dan budaya, serta memperkayanya dengan analisis faktor sosial-ekonomi yang kontekstual dengan realitas di Kecamatan Kota Masohi.

Kesenjangan Metodologis

Studi terdahulu seperti Faqi et al. (2023) berfokus pada persepsi pemilih pemula saja dan menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana, sementara penelitian yang dilakukan Zahra et al. (2024) menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menawarkan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif dengan melibatkan 39 informan dari berbagai latar belakang (pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan partai politik) dan menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pencegahan.

Kesenjangan Solusi dan Implementasi

Penelitian-penelitian sebelumnya belum menawarkan strategi pencegahan konkret yang mempertimbangkan konteks lokal. Romadhon et al. (2023) hanya membahas upaya Bawaslu dari perspektif regulasi, tanpa mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat dimanfaatkan dalam strategi pencegahan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan merumuskan strategi berjenjang yang didasarkan pada analisis SWOT, meliputi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang mengakomodasi karakteristik sosial-budaya masyarakat Kecamatan Kota Masohi.

Kesenjangan Literatur tentang Dinamika Politik di Indonesia Timur

Meskipun terdapat banyak studi tentang politik uang di Indonesia, masih sangat terbatas penelitian yang fokus pada dinamika politik di wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku. Data menunjukkan bahwa praktik politik uang di wilayah ini memiliki pola dan karakteristik berbeda yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tradisional. Penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan literatur tentang politik elektoral di Indonesia Timur yang masih sangat terbatas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh (Sintia Nurjuiha, Suryanef, Al Rafni 2022), mengunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan fenomena politik uang. Membahas tentang praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi dan tidak sesuai dengan tujuan Pembangunan politik di Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterahkan seluruh rakyat. Persmaan dengan peneliti membahas fenomena politik uang dalam konteks pemilu. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada persfektif teorical development dan lokasi penelitian ini berfokus pada Provinsi Jawa Timur. Penelitian oleh (Christy Messy Lampus, Merlien T. Lopian, Efendi Sondakh 2022), mengunakan data yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang berdasar pada fenomena politik di kecamatan Wanea. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan dalam penelitan berfokus pada fenomena politik uang dan lokus penelitian dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaan merujuk pada penelitian yang komprehensif dengan memberikan gambaran praktik pada politik uang tersebut. Penelitian oleh (Achmad fachri faqi, Muh. Hasrul, Amaliyah, Ismail Iskandar, M. Aris Munandar 2023) berfokus pada pemilih pemula sebagai normalisasi praktik politik uang. Metode yang digunakan pada data primer menggunakan deskriptif kualitatif dan data tambahan dengan melakukan penyebaran kuisioner. Persamaan penelitian ini berfokus juga informan pemilih pemula yang cenderung seimbang dalam menyikapi dinamika politik uang. Perbedaannya terlihat dalam srmua informan pemilih pemula dengan focus pada persepsi pemilih dalam menyikapi praktik politik uang. (Asif Rizky Romadhon, Muhammad Pikri, Jaka Irwandi 2023) berfokus pada upaya Lembaga pengawas pemilu BAWASLU Tanjung Pinang dalam menangulangi praktik politik uang yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan peneliti sama dalam fokus pada upaya BAWASLU sebagai Lembaga pengawas Pemilu. Perbedaannya pada analisis strategi yang mempengaruhi paraktik politik uang di Kota Tanjung Pinang. (Maitza Zahra, Maria Imelda, Nabila Ar-Rifdah, Reysha Nurul, Athhar Muhammad 2024) Penelitian menyatakan ini bahwa Praktik Politik Uang di Kota Serang terjadi karena rusaknya tatanan demokrasi. Meskipun upaya dari Lembaga pengawas dan penegak hukum tidak berjalan efektif. Persamaan penelitian ini berfokus pada fenomena Politik uang yang terjadi pada Pemilu. Perbedaannya dilihat pada penelitian yang dilakukan di level kota (Kota Serang) dan menggunakan analisis studi kepustakaan. Praktik politik uang masih menjadi fenomena dominan dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, baik dalam skala lokal maupun nasional. Penelitian oleh Auza et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan elektabilitas partai seperti Golkar di Sumatera Utara tanpa indikasi kuat praktik politik uang, fenomena ini tetap menjadi tantangan besar bagi integritas demokrasi. Praktik seperti pemberian bantuan sosial bermuatan politik dan kooptasi suara pemilih terus berlangsung secara sistemik di berbagai tahapan pemilu. Sebaliknya, inisiatif lokal seperti yang terjadi di Desa Parengan, Lamongan, menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat menjadi alat efektif untuk menanggulangi politik uang. Desa ini, sebagai bagian dari program Desa Anti Politik Uang (Desa APU), berhasil membangun resistensi terhadap praktik jual beli suara melalui mobilisasi masyarakat, kolaborasi dengan Bawaslu, serta pendekatan berbasis nilai dan religiusitas lokal. Namun, secara umum, praktik politik uang di Indonesia tetap sulit diberantas karena minimnya penegakan hukum dan lemahnya institusi pengawas pemilu. Qodir (2014) menekankan bahwa pelaku politik uang seringkali tidak tersentuh hukum karena tidak ada bukti formal, serta lemahnya kekuatan substansial dari KPU dan Bawaslu. Muhtadi (2013) menyoroti bahwa praktik politik uang berkorelasi dengan rendahnya identifikasi partai (party-ID) di kalangan

pemilih. Voter yang tidak memiliki keterikatan ideologis dengan partai politik cenderung lebih mudah menerima imbalan material. Kegagalan partai politik dalam membangun kredibilitas memperkuat hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih, memperparah budaya klientelisme dan patronase. Penelitian dari (Fawwaz Muhammad A. 2022) mengenai efektivitas gerakan sosial berbasis komunitas dalam melawan praktik politik uang. Studi kasus di Desa Parengan, Lamongan menunjukkan bahwa resistensi terhadap politik uang dapat dibentuk melalui penguatan nilai religiusitas, kolaborasi antar aktor lokal, dan kampanye pendidikan politik partisipatif. Dalam konteks yang berbeda, strategi semacam ini berpotensi untuk direplikasi di Kecamatan Kota Masohi, yang juga memiliki struktur sosial berbasis kekerabatan (pela-gandong) yang kuat, dengan pendekatan yang disesuaikan secara kultural. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengembangkan strategi serupa namun kontekstual, menggunakan analisis SWOT untuk memformulasikan intervensi jangka pendek hingga panjang yang relevan dengan kondisi masyarakat Maluku.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus , menjelaskan bahwa politik uang itu sendiri terjadi bukan hanya dari faktor sosio-ekonomi saja tetapi juga disebabkan oleh faktor politik, hukum dan budaya yang dijelaskan pada teori mada sukamajati (2021) dan berbeda dari lima penelitian sebelumnya yang berfokus pada konteks tempat, partisipasi serta lembaga yang menjadi analisis penelitian, peneliti menggunakan analisis swot untuk merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya politik uang di pemilihan yang akan datang dan menjadi suatu kebaruan penelitian. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Kecamatan Kota Masohi, mengidentifikasi dan menganalisis apakah politik uang itu dapat diminimalisir serta merumuskan suatu strategi yang dapat digunakan dalam pecegahan praktik politik uang di Kecamatan Kota Masohi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif-analitik dengan studi kasus di Kecamatan Kota Masohi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 39 informan yang terdiri dari unsur pengawas pemilu, unsur penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dan snowball sampling. Analisis data menggunakan analisis data SWOT (Creswell 2023) meliputi reduksi data, penyajian data, analisis SWOT dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi data dan waktu untuk memastikan kredibilitas data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Terjadinya Politik Uang di Kecamatan Kota Masohi

Penyebab terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada di Kecamatan Kota Masohi dapat dikategorikan sesuai dengan tiga dimensi utama dalam teori politik uang Mada Sukamajati (2021), yaitu faktor politik, faktor hukum, dan faktor budaya.

a) Faktor Politik

Faktor ini meliputi : keterbatasan politik dalam mempengaruhi proses berjalannya suatu

pemilihan umum dengan permasalahan di dalam internal partai politik ataupun masyarakat dalam menanggapi politik uang yang terjadi. Dipengaruhi oleh rendahnya kualitas program kerja calon kerja, lemahnya peran partai politik serta strategi pemenangan pasangan calon yang bersifat transaksional.

b) Faktor Hukum

Faktor ini meliputi : berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan PKPU no 13. Tahun 2024 yang menjelaskan tentang pemilihan umum dan pembatasan pemberian uang dalam kampanye politik ternyata tidak dipahami oleh Masyarakat Kecamatan Kota Masohi. Masyarakat Kecamatan Kota Masohi menanggapi bahwa lemahnya regulasi atau hukum yang berlaku disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dari pihak pengawas serta keterbatasan system pengawasan

c) Faktor Budaya

Budaya yang sudah melekat erat dengan Masyarakat Kecamatan Kota Masohi yaitu dinasti politik dan politik uang. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan pak Yusuf Rumadan selaku Ketua PPS Namaelo menjelaskan “Di Namaelo, Keekerabatan atau hubungan pela-gandong sangat kuat pengaruhnya. Kalau ada calon dari marga atau soa (klan) tertentu, biasanya keluarga besar dari marga yang sama akan kompak mendukung, bahkan tanpa perlu politik uang” dari hasil wawancara ini, dijelaskan system kekerabatan dengan menerapkan marga atau soa menunjukan budaya politik yang tidak sesuai dengan jalannya demokrasi yang jujur, bersih, dan adil dalam melaksanakan pemilihan umum.

3.2. Kemungkinan Minimalisasi Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kota Masohi

Tabel 1.
Pandangan Informan tentang Kemungkinan Minimalisasi Politik Uang

Kelompok Informan (1)	Pandangan Optimis (%) (2)	Pandangan Realistis (%) (3)	Argumentasi Utama (4)
Pengawas Pemilu (n=4)	25%	75%	"Proses penindakan masih banyak kendala. SDM terbatas, masyarakat tidak mau menjadi saksi."
Penyelenggara Pemilu (n=4)	50%	50%	"Partisipasi masyarakat masih rendah. Program pengawasan partisipatif kami memang ada, tetapi yang aktif melaporkan hanya 20%."
Tokoh Masyarakat (n=8)	75%	25%	"Tokoh agama memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat. Kami bisa menggunakan mimbar khotbah untuk edukasi."
Masyarakat Umum (n=18)	33%	67%	"Masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki, dan berpikir 'ambil saja, toh waktu mencoblos nanti sesuai hati nurani'."
Partai Politik (n=5)	20%	80%	"Jujur, butuh waktu panjang dan perubahan mendasar. Yang diperlukan adalah perubahan sistemik."
Total/Rata-rata (n=39)	40,5%	59,5%	-

Sumber: Hasil Olahan data penelitian, 2025

Pada Tabel 1, Pandangan informan terhadap faktor kemungkinan dalam meminimalisir adanya politik uang terlihat dalam dua objek pandangan yaitu optimis dan realistis. Pada pandangan optimis terjadi persentase tertinggi pada tokoh Masyarakat sebesar 70% yang mengharapkan bahwa politik uang sendiri ternyata memiliki harapan besar untuk dapat di minimalisir. Pada pandangan realistis sendiri partai politik memiliki persentase tertinggi sebesar 80%, mengartikan bahwa partai politik sendiri juga tidak dapat memprediksi jika dikemudian hari praktik dari politik uang ini sendiri bisa diminimalisir, padangan realistis sendiri berpedoman pada bagaimana suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa suatu argument masih menjadi harapan yang masih bisa dikembangkan.

3.3. Faktor Strategi Pencegahan Praaktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan Kota Masohi

Tabel 2.

Matriks SWOT Strategi Pencegahan Politik Uang di Kecamatan Kota Masohi

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
S1: Kapasitas kelembagaan pengawas pemilu	W1: Keterbatasan SDM pengawas (jumlah dan kapasitas)
S2: Jaringan tokoh masyarakat berpengaruh (agama, adat, pemuda)	W2: Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus
S3: Peningkatan kesadaran di kalangan pemilih muda	W3: Keterbatasan teknologi dan infrastruktur pengawasan
S4: Program pengawasan partisipatif yang telah berjalan	W4: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (hanya 20%)
PELUANG (Opportunities)	ANCAMAN (Threats)
O1: Perkembangan teknologi digital untuk pengawasan	T1: Evolusi pola politik uang yang semakin canggih
O2: Peningkatan literasi digital masyarakat	T2: Resistensi dari elit politik yang diuntungkan
O3: Penguatan regulasi anti politik uang di tingkat nasional	T3: Normalisasi politik uang dalam masyarakat
O4: Peningkatan peran media dalam pengawasan	T4: Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan (kemiskinan 16,2%)

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Pada Tabel 2, Analisis SWOT dipilih sebagai kerangka perumusan strategi pencegahan politik uang di Kecamatan Kota Masohi karena kemampuannya mengintegrasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan) dan eksternal (peluang dan ancaman dalam lingkungan politik-sosial) secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi sistematis terhadap kapasitas kelembagaan pengawas, keterbatasan sumber daya, karakteristik sosial-budaya masyarakat, serta perkembangan teknologi yang relevan.

. Melalui matriks interaksi, dihasilkan strategi yang berjenjang (SO, WO, ST, WT) yang tidak hanya visioner tetapi juga implementatif, dengan mempertimbangkan konteks lokal Kecamatan Kota Masohi. Keunggulan utama analisis SWOT adalah kemampuannya menghasilkan

rekomendasi yang operasional dengan periodisasi waktu yang jelas (jangka pendek, menengah, panjang), sehingga upaya pencegahan politik uang menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 3.

Matriks Strategi SWOT Pencegahan Politik Uang di Kecamatan Kota Masohi

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Strategi SO: 1. Pengembangan Sistem Pengawasan Partisipatif Berbasis Teknologi (S4+O1+O2)- Aplikasi pelaporan digital- Kampanye media sosial- Pelatihan digital pengawas2. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dalam Edukasi (S2+O2+O4)- Forum lintas agama dan adat- Materi edukasi kontekstual- Platform digital penyebaran pesan3. Mobilisasi Pemilih Muda sebagai Agen Perubahan (S3+O2+O4)- Komunitas pemilih cerdas- Pelatihan pemilih pemula- Kampanye kreatif anti politik uang	Strategi WO:1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas melalui Teknologi (W1+O1)- Pelatihan teknologi pengawasan- Sistem monitoring berbasis digital- Jaringan relawan digital2. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga (W2+O1+O3)- Platform terintegrasi Sentra Gakkumdu- Standarisasi prosedur penanganan- Sistem tracking penanganan kasus3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat (W4+O2+O4)- Kampanye "Jadi Pengawas Digital"- Insentif pelapor terverifikasi- Kolaborasi dengan media lokal
ANCAMAN (T)	Strategi ST:1. Penguatan Kapasitas Deteksi Pola Politik Uang (S1+T1)- Pelatihan khusus deteksi- Database pola politik uang- Kerjasama dengan akademisi2. Pembentukan Koalisi Anti Politik Uang (S2+T2+T3)- Forum lintas agama dan adat- Pakta integritas anti politik uang- Mobilisasi tekanan sosial3. Kampanye Perubahan Norma Sosial (S3+T3)- Kampanye "Pilih Tanpa Uang"- Narasi tandingan politik uang- Pelibatan role model Masyarakat	Strategi WT:1. Pengembangan Sistem Deteksi Dini Politik Uang (W1+W3+T1)- Sistem deteksi berbasis data- Pelatihan teknik investigasi- Jaringan informan komunitas2. Edukasi Politik Berbasis Konteks Lokal (W4+T3)- Modul edukasi kontekstual- Program pendidikan di sekolah- Materi dalam bahasa lokal3. Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan (W4+T4)- Kolaborasi dengan program pemerintah- Pelatihan keterampilan dan wirausaha- Pengembangan jaminan sosial

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Penentuan strategi melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) didasarkan pada evaluasi sistematis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya pencegahan politik uang di Kecamatan Kota Masohi. Proses identifikasi keempat elemen SWOT dilakukan melalui triangulasi data dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian divalidasi melalui diskusi dengan informan kunci.

- Perumusan strategi SO (Strength-Opportunity) : Strategi SO (Strength-Opportunity): Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang
- Perumusan strategi SO (Strength-Opportunity) : Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- Perumusan strategi SO (Strength-Opportunity) : Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
- Perumusan strategi SO (Strength-Opportunity) : Meminimalkan kelemahan dan menghindari dari ancaman

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Praktik politik uang di Kecamatan Kota Masohi menunjukkan pola yang kompleks dengan beragam faktor determinan. Sama halnya dengan temuan Nurjulaiha et al. (2022) di Provinsi Jambi, penelitian ini mengonfirmasi bahwa praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi

dan menciptakan distorsi preferensi pemilih. Data survei menunjukkan 65% pemilih Masohi memilih berdasarkan "pemberian bantuan langsung" dibandingkan program kerja (8%).

Berbeda dengan temuan Lampus et al. (2022) yang menyatakan pemberian sembako dianggap wajar tanpa pengaruh signifikan pada pilihan pemilih di Wanea, penelitian ini menemukan korelasi kuat antara pemberian material dan preferensi elektoral di Masohi. Fenomena ini memperkuat hasil penelitian Aspinall dan Sukmajati (2015) tentang korelasi antara lemahnya kualitas program kandidat dengan ketergantungan pada politik uang.

Normalisasi politik uang di Masohi dengan 68% responden menganggapnya "hal biasa" sejalan dengan penelitian Faqi et al. (2023) tentang normalisasi di kalangan pemilih pemula. Sistem peladong dan budaya balas budi memperdalam pemahaman dari studi Aspinall (2014) dengan memberikan bukti empiris spesifik tentang bagaimana nilai-nilai tradisional menjadi infrastruktur sosial yang memfasilitasi politik uang di Maluku.

Tingkat keberhasilan penindakan yang sangat rendah (1,3%) berbeda signifikan dengan temuan Romadhon et al. (2023) tentang efektivitas Bawaslu di Tanjungpinang, menunjukkan variasi dalam kapasitas institusional antar daerah. Strategi pencegahan berjenjang yang diusulkan penelitian ini memperluas konsep dari penelitian Zahra et al. (2024) di Kota Serang dengan pendekatan komprehensif yang meliputi teknologi, edukasi politik, dan pemberdayaan ekonomi.

3.2. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian mengungkapkan beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam upaya minimalisasi politik uang di Kecamatan Kota Masohi. Faktor penghambat utama meliputi normalisasi politik uang sebagai "hal biasa" (68% responden), lemahnya penegakan hukum dengan tingkat penyelesaian kasus hanya 1,3%, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan dengan tingkat kemiskinan 16,2%. Kendala penegakan hukum didominasi oleh keterbatasan bukti (42%) dan ketidakmauan saksi bersaksi (35%), menciptakan persepsi bahwa praktik politik uang adalah aktivitas "berisiko rendah" dengan potensi keuntungan tinggi bagi para kandidat.

Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi faktor pendukung yang berpotensi menjadi modal untuk meminimalisir praktik politik uang. Faktor-faktor tersebut mencakup meningkatnya kesadaran kritis di kalangan pemilih muda yang menunjukkan resistensi terhadap politik transaksional, potensi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, dan peran strategis tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini publik. Kombinasi antara peluang-peluang ini dengan tantangan struktural yang ada menciptakan lanskap kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi dan kontekstual untuk mengatasi praktik politik uang di Kecamatan Kota Masohi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian tentang politik uang dalam Pilkada 2024 di Kecamatan Kota Masohi mengungkapkan fenomena kompleks yang berakar pada empat faktor utama: politik (rendahnya kualitas program kerja calon), hukum (lemahnya implementasi regulasi), budaya (normalisasi praktek politik uang), dan sosial-ekonomi (kemiskinan dan pendidikan). Politik uang telah

mengalami normalisasi dalam masyarakat, dengan 68% responden menganggapnya sebagai hal biasa dan sistem pela-gandong menjadi infrastruktur sosial yang memfasilitasi praktiknya.

Tingkat keberhasilan penindakan yang sangat rendah (1,3%) menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi. Meski menghadapi tantangan berat, studi ini menemukan potensi minimalisasi melalui strategi komprehensif yang mencakup pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, penguatan peran tokoh masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi pencegahan politik uang yang kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya spesifik Maluku. Diperlukan pendekatan jangka panjang yang menysasar akar permasalahan untuk meminimalisir praktik politik uang secara efektif, serta penelitian lanjutan yang mengeksplorasi efektivitas intervensi berbasis kultural dalam konteks masyarakat adat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dan mengingat keterbatasan waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Analisis Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh partisipasi dari masyarakat dan terkhusus untuk para tokoh penyelenggara Pilkada di Kecamatan Kota Masohi yang membantu menyelesaikan penelitian



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Auza, A., Zulkarnain, I., Humaizi, & Kurniawati, D. (2025). *Money Politic Practices Towards the Winning of the DPD 'Partai Golongan Karya' Province 'Sumatera Utara' in the 2024 Legislative General Election*. *SDGsReview*, Vol. 5, e03856. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n04.pe03856>
- Begum, I. (2022). General Election in Pakistan: A critical study. *FWU Journal of Social Sciences*, 16(3), 132-143. <https://doi.org/10.51709/19951272/FALL2022/10>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Daud, B. S., Aminullah, B. A., & Jaya, N. S. P. (2020). Law Enforcement and Overcoming Violations of Money Politic in General Election: Indonesia's Case. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2), 124-129. <https://pdfs.semanticscholar.org/a934/75d51edf12b9507b140ededab43670d90b64.pdf>
- Fawwaz Muhammad A. (2022). *Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62946/1/FAWWAZ%20MUHAMMAD%20A.IP.pdf>
- Faqi, A. F., Hasrul, M., Amaliyah, A., Iskandar, I., & Munandar, M. A. (2023). *Student Perceptions as Beginner Voters Against The Normalization of Money Politics In General Election*. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 1-16. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/114632896/208-libre.pdf?1715922320=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPersepsi mahasiswa sebagai pemilih pemul.pdf&Expires=1747717823&Signature=cjBqe~MJLAi51e7oE1GXuugHC9jYMN0VOZ~k3nuw5hr2sNeCv5uxC-c1zSrQ-FLugMXly9pQXinmg-GMvVG7xOrdFkx3w4d5K4Cp7BfhYCTtuO41GSakL5Yb7TraB1vQ1pKzkYSqERGyOUx0F-Q1IL~FyKTn-7yqEwcftbfJHxSGBfCBw7iU2wff8AhPGEoDANWWUsREWpkro1SsqtnbCBAMb44MT9JVdfM8cENXaTF3CJbIRL6aXQLERwAOUp3cQOhMsYO9kktEOtho1HmUwUu~ti7NYXtJ3V61PsWABqllrTVvzIKhCsSHc0fDaPZztPzUE3edDRDXAt-ApClirQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/114632896/208-libre.pdf?1715922320=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPersepsi+mahasiswa+sebagai+pemilih+pemul.pdf&Expires=1747717823&Signature=cjBqe~MJLAi51e7oE1GXuugHC9jYMN0VOZ~k3nuw5hr2sNeCv5uxC-c1zSrQ-FLugMXly9pQXinmg-GMvVG7xOrdFkx3w4d5K4Cp7BfhYCTtuO41GSakL5Yb7TraB1vQ1pKzkYSqERGyOUx0F-Q1IL~FyKTn-7yqEwcftbfJHxSGBfCBw7iU2wff8AhPGEoDANWWUsREWpkro1SsqtnbCBAMb44MT9JVdfM8cENXaTF3CJbIRL6aXQLERwAOUp3cQOhMsYO9kktEOtho1HmUwUu~ti7NYXtJ3V61PsWABqllrTVvzIKhCsSHc0fDaPZztPzUE3edDRDXAt-ApClirQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea. *JURNAL POLITICO*, 11(2), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/42512>

- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1, 41–58. <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/download/11087/8773>
- Nurjulaiha, S., Suryanef, & Rafni, A. (2022). Fenomena Politik Uang (*Money Politics*) pada Pemilu Menurut Perspektif Teori Political Development (Studi di Provinsi Jambi). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 1-7. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/download/10/8>
- Qodir, Z. (2014). Politik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>
- Romadhon, A. R., Pikri, M., & Irwandi, J. (2023). BAWASLU's Efforts to Overcome the Practice of Money Politics in Tanjungpinang City. *Journal of Election and Leadership*, 2(2), 46-57. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i7.5080>
- Rowa, H. (2015). Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/13595/1/BUKU%20DEMOKRASI%20DAN%20KEBANGSAA N.pdf>
- Sule, B., Adamu, U., & Sambo, U. (2020). The 2019 General Election in Nigeria: Examining the Issues, Challenges, Successes and Lessons for Future General Elections. *International Journal of Social Sciences Perspectives*, 6(2), 100-113. <https://doi.org/10.33094/7.2017.2020.62.100.113>
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik: Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Sumedang: IPDN Press. <http://eprints.ipdn.ac.id/2490/1/Desentralisasi%20Demokratis.pdf>
- Zahra, M., Imelda, M., Ar-Rifdah, N., Nurul, R., & Muhammad, A. (2024). Analisis Penerapan Politik Uang pada Masa Demokrasi di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 23(1), 1-12. <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/103/93>